

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

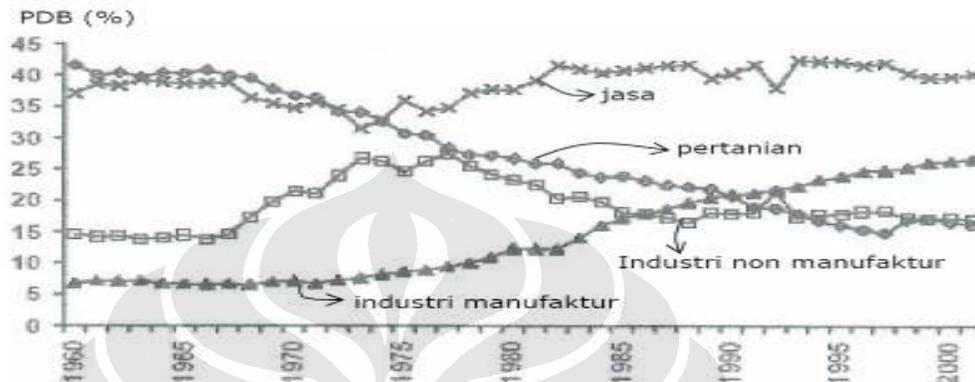
Negara-negara berkembang terus berusaha untuk memacu pembangunan ekonominya demi mengejar ketertinggalannya dari negara maju. Ada berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ini diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Banyak negara dan lembaga internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), IMF dan UNDP, menggunakan PDB sebagai indikator untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi suatu negara.

Melalui indikator pertumbuhan ekonomi ini, Indonesia dicatat oleh Bank Dunia dalam sebuah kajiannya yang diterbitkan dalam buku berjudul *The East Asian Miracle, Economic, Growth and Public Policy*, September 1993, sebagai kelompok negara yang memiliki keajaiban pertumbuhan. Bahkan pada saat itu Indonesia diramalkan akan menjadi sebuah negara industri baru di Asia Tenggara. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang tercatat cukup menjanjikan sampai dengan tahun 1996. PDB riil yang dicapai selama periode tahun 1969-1996, melesat dari Rp 49,445 miliar di tahun 1969 menjadi Rp 298,030 miliar di tahun 1996, sehingga terjadi pertumbuhan rata-rata 6,87% per tahun (Alkadri, 1999).

Selain pertumbuhan yang dinilai ajaib, perekonomian Indonesia juga diwarnai oleh transformasi struktur ekonomi dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDB, dimana sektor industri manufaktur berperan lebih besar dari sektor pertanian (Gambar 1-1). Transformasi ini membawa implikasi ke berbagai bidang kegiatan ekonomi lainnya seperti

sumber daya manusia (tenaga kerja), upah tenaga kerja, ekspor dan impor, investasi asing dan penyediaan infrastruktur serta tuntutan terhadap iklim ekonomi yang lebih baik.

Gambar 1-1 Kontribusi berbagai sektor ekonomi pada PDB Indonesia (%)



Sumber: BPS (diolah)

Perubahan struktur perekonomian selalu dialami oleh setiap negara. Semakin maju perekonomian suatu negara maka semakin kuat sektor industri-modern menggeser sektor pertanian-tradisional. Hal ini disebut sebagai tahap industrialisasi. Dalam industrialisasi, perkembangan sektor industri manufaktur memiliki peranan yang penting. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik negara berkembang yang hanya mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja sebagai sumber utama proses industrialisasi¹. Industrialisasi sendiri dibagi menjadi 4 tahap, yaitu (1) tahap non industrialisasi, (2) tahap dalam proses menuju industrialisasi, (3) tahap semi industri, dan (4) tahap industrialisasi penuh².

Data GDP (*Gross Domestic Product*) Indonesia selama periode 1988–2005, menunjukkan bahwa di awal tahun 90-an telah terjadi transformasi struktural di Indonesia³. Dapat dilihat bahwa hingga tahun 1989, sektor pertanian masih mendominasi sebagai sektor yang memberi sumbangan terbesar terhadap GDP. Tetapi pada tahun 1990 terlihat

¹ Khristina Curry, *Peranan Pertumbuhan Sarana dan Prasarana terhadap Pertumbuhan Industri Manufaktur Regional Indonesia: Suatu Model Analisis Spasial (Studi Kasus 26 Propinsi di Indonesia)*. Thesis Program Pascasarjana Ekonomi Universitas Indonesia, 2003, hal.5.

² Prayitno dan Santoso, *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996, hal. 233.

³ Data GDP Indonesia periode 1988 – 2005 tercantum dalam lampiran yang diperoleh melalui situs www.adb.org/statistics.

perubahan struktural dimana sektor industri manufaktur menggantikan sektor pertanian sebagai pemberi sumbangan terbesar terhadap GDP. Bahkan selama lima belas tahun selanjutnya, sektor industri manufaktur tetap menjadi ujung tombak dalam perekonomian nasional.

Era globalisasi dan liberalisasi industri dan perdagangan dua dasawarsa terakhir sungguh memberikan pengaruh yang signifikan bagi industri di Indonesia. Salah satu dampaknya ialah pada ketatnya persaingan industri yang terjadi akibat berkurangnya batas-batas antar negara. Negara yang tidak memiliki perusahaan-perusahaan yang kompetitif akan tergeser oleh perusahaan asing (*Multi National Companies*, MNC). Mengingat pentingnya sektor industri untuk menjadi motor penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, maka pemerintah berkewajiban untuk mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia. Pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim industri yang kondusif melalui perbaikan infrastruktur, sistem kelembagaan dan birokrasi yang baik, serta peraturan yang tidak melulu memberatkan pengusaha maupun tenaga kerja.

Namun demikian, transformasi struktur ekonomi tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur yang baik bagi pembangunan suatu negara, karena kesejahteraan masyarakat juga ditentukan oleh persoalan distribusinya. Transformasi struktural ekonomi juga memiliki dampak negatif berupa munculnya pengangguran struktural yang tidak mungkin tertampung seluruhnya pada sektor industri dan jasa⁴. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Berdasarkan data BPS pada Februari 2006 diketahui bahwa pengangguran terbuka sebesar 11,1 juta orang, setengah menganggur 29,9 juta orang.

⁴ Utomo Widodo, *Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia pada Tahun 2020: Permasalahan dan Tantangan*. Makalah, 1998, hal 9.

Tabel 1-1 Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia 2004-2006

Rincian	2004	2005		2006
	Agustus	Februari	November	Februari
Penduduk usia >15 tahun (juta jiwa)	153,9	155,5	158,5	159,3
Angkatan kerja (juta jiwa)	104	105,8	105,9	106,3
• bekerja	93,7	94,9	94	95,2
• tidak bekerja (penganggur terbuka)	10,3	10,9	11,9	11,1
Setengah menganggur (juta jiwa)	27,9	29,6	28,9	29,9
• sukarela	14,5	15,3	15,0	15,7
• terpaksa	13,4	14,3	13,9	14,2
Bukan angkatan kerja (juta jiwa)	50	49,7	52,6	53
Jumlah penganggur (juta jiwa)	38,2	40,5	40,8	41,0
Tingkat pengangguran terbuka (%)	9,9	10,3	11,2	10,4

Sumber: BPS (diolah)

Sempitnya lapangan pekerjaan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah kelangkaan modal untuk berinvestasi. Di samping itu, ledakan penduduk juga diyakini sebagai manifestasi utama dalam mempengaruhi tingginya angka pengangguran di negara-negara berkembang. Masalah pengangguran menjelma menjadi suatu masalah kronis yang mau tidak mau harus dihadapi oleh negara-negara berkembang. Diperkirakan bahwa dari sekitar 725 juta penduduk dunia yang tinggal di kota pada tahun 1950, hanya sekitar 38 persen di antaranya adalah penduduk di negara berkembang. Secara tidak terduga seperempat abad kemudian, angka persentase itu bergerak naik menjadi sekitar 51 persen untuk negara berkembang dan 49 persen untuk negara maju. Diperkirakan pada tahun 2000 perbedaan persentase tersebut semakin melebar menjadi 66 dan 34 persen⁵. Dengan demikian sejarah urbanisasi di negara berkembang telah membalikkan asumsi teori urbanisasi yang terlanjur dibangun berdasarkan pengalaman negara-negara maju. Asumsi itu adalah bahwa industrialisasi menjadi penggerak urbanisasi dan kota hanya mampu berkembang atas dasar topangan industrialisasi.

Fakta menunjukkan bahwa laju industrialisasi di negara berkembang sangat lambat, tetapi tingkat urbanisasi nya justru relatif tinggi. Menurut Bairoch, antara tahun 1920

⁵ Todaro, Michael P dan Stilkind, Jerry, *Dilema Urbanisasi*, dalam C. Manning dan T. N. Effendi (ed), *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: PT. Gramedia, 1985, hal 5.

hingga 1980 hanya terjadi kenaikan GNP sebesar 95 persen, sementara laju urbanisasi mengalami akselerasi hingga 169 persen⁶. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa pola urbanisasi tidak harus linear dengan industrialisasi seperti yang terjadi di negara-negara industri. Di negara berkembang, latar belakang terjadinya kota itulah yang mempengaruhi pola urbanisasinya.

Transformasi struktural atau dengan kata lain industrialisasi menjadi sebuah paradoks di dalam pertumbuhan ekonomi sebuah kota di negara berkembang. Hal ini mungkin disebabkan karena: (1) pembangunan ekonomi yang kurang terencana dengan baik. Kecenderungan untuk mengutamakan pertumbuhan sektor modern melalui industri padat modal yang berpusat di kota, dengan sempurna menjadikan kota sebagai sumber polarisasi sosial ekonomi, yang akhirnya mendorong ketimpangan regional dengan menjadikan daerah pedesaan sebagai kawasan tertinggal. Selanjutnya kondisi ini akan mendorong arus urbanisasi dari desa ke kota. Disamping itu, (2) rasa optimisme yang berlebihan dari perencanaan pembangunan terhadap sektor industri sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi juga menjadi faktor penyebab paradoks tersebut. Faktanya sebagian besar penduduk negara berkembang sangat tergantung pada sektor pertanian. Pangsa relatif sektor pertanian dalam PDB tahun 1967 sekitar 67% menurun menjadi hanya 17,2% pada tahun 1995. Sementara untuk kurun waktu yang sama pangsa industri meningkat dari 5% menjadi 24,3%. Namun demikian, pangsa tenaga kerja sektor pertanian belum menurun secara berarti, bahkan sampai tahun 1995 masih sebesar 48% dari total tenaga kerja⁷. Di samping itu mutu sumber daya manusia juga masih rendah, sehingga mereka tidak dapat diserap secara maksimal oleh sektor industri yang dikembangkan tersebut (*skill mismatch*). Apalagi investasi sektor industri tersebut lebih bertujuan untuk

⁶ Bairoch, Paul. *Cities and Economic Development: From the Dawn of History to the Present*. Chicago: University of Chicago Press, 1988, hal 458.

⁷ Nainggolan, Hotden L., *Pertanian Indonesia dalam Perspektif Industrialisasi dan Perdagangan Bebas; Suatu Pendekatan Teoritis*, www.ekonomirakyat.org, 2007.

mengimpor teknologi tinggi yang diyakini justru sangat terbatas menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti sebuah paradoks, dimana modal yang terbatas digunakan untuk mengimpor teknologi padat modal dan teknologi tersebut diinvestasikan di dalam lingkungan (baca: kota) yang memiliki kelebihan tenaga kerja⁸

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dijadikan satu-satunya landasan dalam kerangka pemikiran pembangunan dan pola pendekatan yang dijalani. Hal ini disadari bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diusahakan dalam suatu arah pertumbuhan yang ditujukan kepada sasaran yang utama, yaitu: perluasan kesempatan kerja, penanggulangan pengangguran, peningkatan permintaan tenaga kerja, dan pemberantasan kemiskinan, dimana satu sama lainnya harus tercermin dalam pola dan arah investasi, serta skala prioritas kebijaksanaan dengan mengutamakan sektor kegiatan ekonomi yang memberi peluang lebih besar bagi lapangan pekerjaan.

Meski demikian, untuk tingkatan makro pertumbuhan ekonomi adalah tetap merupakan cara yang terbaik dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, penting untuk melihat pertumbuhan elastisitas tenaga kerja, dimana elastisitas ini mengukur seberapa besar dampak dari tiap persen pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan tenaga kerja. Meskipun konsep elastisitas tenaga kerja ini telah berulang kali dikritik di dalam pengimplementasiannya, tetapi konsep ini tetap digunakan secara luas dalam menganalisa struktur pasar tenaga kerja dan menjadi populer khususnya untuk lingkup Indonesia dalam hal membuat kebijakan.

Berbagai kritik yang muncul terhadap konsep elastisitas tenaga kerja ini antara lain ialah⁹ (1) isu mengenai hubungan dua arah di antara tenaga kerja dengan output, (2) elastisitas tenaga kerja hanya valid untuk sebuah tingkatan teknologi dan pengetahuan yang diberikan pada waktu tertentu, (3) pengukuran elastisitas ini sulit dipraktikkan di

⁸ Todaro, Michael P dan Stilkind, Jerry, *Ibid*, hal. 15.

⁹ Islam, Iyanatul dan Nazara, Suahasil, *Estimating Employment Elasticity for The Indonesian Economy*. Technical Note ILO, 2000, hal 5.

Indonesia mengingat karakter budaya di Indonesia yang memungkinkan hipotesis pengangguran sebagai sesuatu yang mewah, dan (4) elastisitas tenaga kerja tidak dapat membedakan dampak perubahan tenaga kerja untuk per sektor PDB dan total PDB. Di samping itu, terdapat dua alasan mengapa kita tetap menggunakan konsep elastisitas tenaga kerja ini yaitu¹⁰: (1) eksistensi dari hubungan tenaga kerja dan PDB yang relatif stabil, dikenal sebagai *Okun's Law* dan (2) adanya kemungkinan untuk merespon terhadap berbagai masalah metodologi yang diterima.

Dengan berlandaskan pada kedua alasan penggunaan konsep elastisitas tenaga kerja yang terdapat di paragraf sebelumnya, maka penelitian ini akan lebih fokus melihat pada seberapa besar dampak pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan melalui transformasi struktural sektor-sektor ekonomi tersebut terhadap perubahan daya serap tenaga kerja di tiap sektor-sektor ekonomi di kota. Oleh karena itu, disamping mengestimasi elastisitas tenaga kerja penelitian ini juga menggunakan analisa *shift share* sebagai alat untuk menganalisa lebih jauh mengenai perubahan komposisi tenaga kerja antar sektor ekonomi serta mendekomposisikannya ke dalam berbagai sumber yang mempengaruhi perubahan komposisi tenaga kerja itu.

I.2 Perumusan Masalah

Transformasi struktural kota memiliki peranan penting dalam keberadaan dan perkembangan kota-kota besar di Indonesia. Adanya proses industrialisasi dari sektor tradisional (primer) ke sektor modern (tersier) berakibat pada perubahan komposisi tenaga kerja yang diserap di masing-masing sektor. Adanya paradoks dalam proses industrialisasi di kota-kota di negara berkembang menjadikan fenomena transformasi struktural menarik

¹⁰ Islam, I dan Nazara, S. Opcit, hal 6

untuk dicermati. Maka itu, beberapa pertanyaan penelitian yang menarik untuk dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Apakah transformasi struktural menghasilkan peningkatan daya serap tenaga kerja di tiap sektor?
2. Bagaimana elastisitas tenaga kerja antar kota?
3. Bagaimana elastisitas tenaga kerja untuk tiap sektor ekonomi di tiap kota?
4. Bagaimana analisis *shift share* untuk masing-masing sektor di tiap kota?

I.3 Tujuan Penelitian

Seperti telah dikemukakan dalam latar belakang, perubahan daya serap tenaga kerja di tiap sektor ekonomi akibat transformasi struktural merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa apakah transformasi struktural menghasilkan peningkatan daya serap tenaga kerja di tiap sektor.
2. Menghitung apakah nilai elastisitas tenaga kerja sama untuk tiap kota yang diteliti.
3. Menghitung apakah nilai elastisitas tenaga kerja sama untuk tiap sektor ekonomi di tiap kota.
4. Menganalisa perubahan komposisi tenaga kerja di tiap sektor ekonomi di tiap kota beserta sumber-sumber perubahannya.

I.4 Kerangka Analisis

Dalam penelitian ini akan dianalisa pengaruh pertumbuhan output regional (PDRB) dan tingkat partisipasi tenaga kerja (PR) terhadap jumlah tenaga kerja (L) di suatu region/kota dengan menggunakan model regresi data panel (*Pooled Least Square*) yang diadaptasi dari penelitian Iyanatul Islam dan Suahasil Nazara (2000) dengan sedikit

modifikasi melalui penambahan variabel independen berupa tingkat partisipasi tenaga kerja dan variabel boneka krisis. Adapun rancangan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$\varepsilon = \frac{\Delta L / L}{\Delta Y / Y} \quad (1)$$

Persamaan (1) merupakan formula yang relevan dalam menghitung elastisitas tenaga kerja (ε), dimana L merupakan tenaga kerja dan Y merupakan PDRB. Pembilang pada persamaan (1) merupakan persentase perubahan tenaga kerja, sementara penyebut pada persamaan di atas merupakan persentase perubahan PDRB. Maka itu, elastisitas tenaga kerja (ε) diinterpretasikan sebagai persentase perubahan tenaga kerja untuk setiap satu persen perubahan pada PDRB.

Dengan persamaan (1) kita hanya dapat menghitung *arc elasticity*, dimana elastisitas dihitung atas dasar dua titik pada waktu yang bersamaan, berbeda dari *point elasticity*. Untuk menghitung *point elasticity* maka kita gunakan model persamaan logaritma linier sebagai berikut.

$$\ln L = \beta_0 + \beta_1 \ln Y \quad (2)$$

Untuk mendapatkan nilai elastisitas tenaga kerja maka kita hitung nilai koefisien regresi (β_1) yang didapat dari persamaan berikut.

$$\beta_1 = \frac{d \ln L}{d \ln Y} = \frac{d L / L}{d Y / Y} \quad (3)$$

$$d \ln Y = d Y / Y$$

Dengan menggunakan persamaan (2), kita memiliki keuntungan berupa kemampuan untuk mengontrol koefisien beta dengan variabel yang lain, sebagai akibat dari penggunaan teknik regresi. Untuk mengilustrasikan kemampuan ini maka kita pakai persamaan berikut.

$$\ln L = f(\ln Y, PR, Z) \quad (4)$$

Persamaan (4) menambahkan variabel Z sebagai variabel lain yang dapat mempengaruhi hubungan tenaga kerja dengan output, dan disebut sebagai parameter 'shift'. Variabel Z ini bisa berupa sebuah variabel boneka (*dummy variable*) seperti perbedaan periode waktu pada saat krisis dengan periode selain krisis pada tahun 1998, terkait dengan tahapan dalam transformasi struktural di sektor-sektor yang ada. Misalnya untuk periode waktu pada saat krisis ekonomi pada tahun 1998, terjadi distorsi di sektor industri dan jasa sehingga terjadi perpindahan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar dari sektor industri (sekunder) dan jasa (tersier) untuk kembali ke sektor pertanian (primer), mengingat banyak pabrik-pabrik industri yang terpaksa tutup pada masa krisis tersebut. Oleh karena itu penting untuk membedakan periode pada saat krisis terjadi dan periode selain krisis. Disamping itu, persamaan (4) juga menambahkan variabel PR (*Participation Rate*) sebagai variabel kontrol persamaan.

Model persamaan yang digunakan untuk mengakomodasi variabel boneka dan variabel kontrol ini ini adalah sebagai berikut.

$$\ln L = \beta_0 + \beta_1 \ln Y + \beta_2 \ln PR + \delta_1 D + \delta_2 (D * \ln Y) \quad (5)$$

dimana D merupakan variabel boneka yang bernilai 1 untuk periode pada saat krisis dan bernilai 0 untuk periode selain krisis. Oleh karena itu,

Persamaan untuk periode selain krisis adalah: $\ln L = \beta_0 + \beta_1 \ln Y + \beta_2 \ln PR$

Persamaan untuk periode pada saat krisis berlangsung adalah: $\ln L = \beta_0 + \beta_2 + \delta_1 + (\beta_1 + \delta_2) \ln Y$.

Kemudian untuk mengestimasi elastisitas tenaga kerja pada tingkat sektoral kita gunakan persamaan sebagai berikut.

$$\ln L_i = f(\ln Y_i, PR_i, Z) \quad (6)$$

Persamaan (6) ini menghitung elastisitas tenaga kerja per sektoral dengan menggunakan data PDRB per sektor dan tingkat partisipasi angkatan kerja per sektor.

Selanjutnya, penelitian tidak berhenti sampai disini melainkan diperdalam dengan menggunakan analisis *shift share* untuk melihat perubahan komposisi tenaga kerja antar sektor ekonomi dan mendekomposisikannya ke dalam berbagai sumber yang mempengaruhi perubahan komposisi tenaga kerja itu. Model yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$e_i^{t+n} - e_i^t = \text{share change} + \text{mix change} + \text{shift change} \quad (7)$$

$$e_i^{t+n} - e_i^t = e_i^t \left[\frac{E^{t+n}}{E^t} - 1 \right] + e_i^t \left[\frac{E_i^{t+n}}{E_i^t} - \frac{E^{t+n}}{E^t} \right] + e_i^t \left[\frac{e_i^{t+n}}{e_i^t} - \frac{E_i^{t+n}}{E_i^t} \right] \quad (8)$$

Dari persamaan (7) dan (8) diatas e_i merupakan total tenaga kerja di kota di sektor i^{th} sedangkan E_i merupakan total tenaga kerja di nasional di sektor i^{th} . Maka itu kita dapat mengestimasi perubahan tenaga kerja di tiap sektor dari waktu t ke waktu $(t+n)$ dengan menggunakan persamaan (8).

1.5 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis sementara yang dibuat oleh penulis dalam penelitian ini ialah¹¹:

1. Transformasi struktural dari sektor primer (tradisional) ke sektor tersier (jasa) menghasilkan peningkatan daya serap tenaga kerja di sektor sekunder (industri) dan sektor tersier (jasa).

¹¹ arah koefisien variabel indepeden dalam hipotesa awal merujuk pada hasil penelitian Iyanatul Islam dan Suahazil Nazara (2000).

2. Elastisitas tenaga kerja nilainya positif dan bervariasi untuk tiap kota.
3. Elastisitas tenaga kerja nilainya bervariasi untuk tiap sektor di masing-masing kota.

I.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis adanya perubahan daya serap tenaga kerja untuk masing-masing sektor di tiap kota besar di Indonesia yang meliputi Jakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar. Metode estimasi yang digunakan adalah pengolahan data panel, dimana data dibatasi dalam kurun waktu selama 12 tahun yaitu dari tahun 1994-2005. Data didapat dari BPS (Badan Pusat Statistik) berupa data sekunder yang harus diolah terlebih dahulu.

I.7 Manfaat Studi

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi khalayak umum, baik di lingkungan internal akademis, maupun bagi masyarakat luas seperti praktisi di bidang ekonomi perkotaan maupun ketenagakerjaan, maupun bagi masyarakat internasional yang menaruh perhatian besar untuk fenomena transformasi struktural yang muncul di tiap kota di negara-negara berkembang.

Terakhir, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan saran terutama kepada pemerintah sebagai pemilik otoritas kebijakan serta memberi manfaat bagi penulis sendiri dalam memperdalam ilmu ekonomi perkotaan yang menjadi fokus perhatiannya.

I.8 Sistematika Penulisan

Penulisan makalah ini akan terdiri dari lima bab dan masing-masing akan terbagi ke dalam sub bab tersendiri. Masing-masing sub bab tersebut akan menjelaskan secara lebih rinci

dari permasalahan yang dibahas pada bab tersebut. Sistematika makalah ini ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi pembahasan latar belakang permasalahan, perumusan masalah atau pertanyaan penelitian, tujuan studi penelitian, kerangka teori (*theoretical framework*), hipotesis, ruang lingkup penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi penjelasan teoritis yang berkaitan dengan permasalahan transformasi struktural yang terjadi di kota-kota di negara berkembang. Berbagai teori dikaji berdasarkan literatur-literatur yang relevan dan berhubungan mengenai permasalahan tersebut. Penelitian-penelitian lain yang sedikit banyak mempengaruhi pengamatan penulis akan diuraikan pula sebagai bahan perbandingan.

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA-KOTA BESAR DI INDONESIA PERIODE 1994-2005

Berisi gambaran umum mengenai kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di lima kota besar (DKI Jakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Makassar) untuk periode 1994 sampai dengan 2005. Masing-masing kota akan dianalisa kontribusi masing-masing sektor nya terhadap total PDRB kota. Disamping itu, juga dilihat perubahan proporsi tenaga kerja terhadap total jumlah tenaga kerja di masing-masing kota dari tahun ke tahun

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Membahas secara singkat mengenai metode penelitian beserta spesifikasi model (persamaan) yang digunakan. Langkah-langkah dalam mengestimasi model juga akan dipaparkan untuk memberi gambaran alur dari proses estimasi model Bagian ini juga

menjelaskan mengenai uji-uji ekonometrika dan asumsi yang digunakan. Serta uji asumsi pelanggaran dan cara men *treatment* data. Disamping itu akan dibahas juga mengenai teori analisis *shift share*.

BAB V HASIL PENELITIAN

Berisi penjelasan dan hasil penelitian yang didapat secara statistik dan ekonometrika yang diolah dengan menggunakan *software* Eviews dan Microsoft Excel. Disamping itu akan dilakukan interpretasi dari hasil-hasil tersebut.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan penutup yang berisikan rangkuman hasil penelitian dan saran-saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, serta keterbatasan dalam penelitian ini dengan harapan agar dikemudian hari dapat dilakukan penyempurnaan studi demi hasil yang lebih baik.

